



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LISA WIJAYANTI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 802975

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.706.600.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 745 m2/156 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000
2. Tanah Seluas 775 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m2/63 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 1.056.000.000
4. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **165.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI L300 PICK UP Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX BBP A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **26.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **12.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.909.600.000**



III. HUTANG

Rp. 363.550.368

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.546.049.632

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.